



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DESA AYUNAN TAHUN ANGGARAN 2020-2023

I Nyoman Alit Badrika

STISIP Margarana

alitbadrika01@gmail.com

Informasi Artikel

Kata Kunci;
*partisipasi
masyarakat,
penyusunan
APBDes,
perencanaan.;*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDES di Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020- 2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menganalisis data yang bersumber dari hasil wawancara mendalam, observasi langsung, kajian pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa APBDes yaitu partisipasi melalui pemikiran dengan memberikan ide atau pendapat dalam penyusunan APBDes Desa Ayunan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dan kemudian dipertimbangkan oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran. Faktor pendukung yaitu 1) Tingkat Pendidikan, sumber daya manusia yang mendukung diharapkan dapat memberikan usulan, ide atau pendapat yang lebih substansial tentang kebutuhan apa yang perlu dan urgen 2) jenis Pekerjaan menentukan aspirasi dan partisipasi apa yang dapat diberikan melalui kegiatan desa. Sedangkan faktor penghambat adalah adalah tidak semua usulan yang disampaikan masyarakat melalui forum musyawarah dusun atau pun musyawarah desa diakomodir menjadi program. Keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan antusiasme warga Desa Ayunan sangat mengikuti setiap proses penyusunan APB Desa Ayunan sangat tinggi.

Abstract

This study aims to determine community participation in the preparation of the APBDES in Ayunan Village, Abiansemal District, Badung Regency for the 2020-2023 Fiscal Year. The method used is descriptive with a qualitative approach and analyzes data sourced from the results of in-depth interviews, direct observations, literature reviews and documentation. The results of the study show that community participation in the preparation of the APBDes village expenditure budget

Keyword;

*community participation,
preparation of APBDes,
planning.;*

is participation through thinking by giving ideas or opinions in the preparation of the Swing Village APBDes in accordance with what the community wants and then considered by the village government in the preparation of the budget. Supporting factors are 1) Education Level, supporting human resources are expected to be able to provide more substantial proposals, ideas or opinions on what needs are necessary and urgent 2) The type of work determines what aspirations and participation can be provided through village activities. Meanwhile, the inhibiting factor is that not all proposals submitted by the community through hamlet deliberation forums or village deliberations are accommodated into programs. Keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan antusiasme warga Desa Ayunan sangat mengikuti setiap proses penyusunan APB Desa Ayunan sangat tinggi.

PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai subjek pembangunan perlu dilibatkan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keberhasilan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh ketersediaan APBDes. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDes sangat dibutuhkan agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Aswari et al., 2019). Tanpa peran aktif masyarakat dalam membuat keputusan berkaitan dengan penyusunan APBDes membuka ruang untuk terjadinya penyimpangan dalam pengalokasian anggaran. Sehingga masyarakat yang memahami kebutuhannya perlu dilibatkan karena pembangunan desa harus mampu memfasilitasi potensi dan sumber daya yang ada di desa. Ini juga menjadi amanat dari Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) No. 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yang salah satunya menekankan pada partisipasi masyarakat yang ideal dalam pengelolaan keuangan desa yakni terkait penganggaran APBDes.

Penyusunan APBDes berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa prinsip antara lain partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (Aswari et al., 2019). Penyusunan APBDes dapat menjadi sarana bagi masyarakat pedesaan untuk menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui pengelolaan finansial. Partisipasi masyarakat sangat penting dan diperlukan untuk menyiapkan anggaran karena perencanaan anggaran merupakan arah kebijakan pemerintah wilayah yang diwujudkan melalui tahapan pembangunan daerah tertentu (Johnson et al., 2022; Lehtonen, 2021; Liao & Zhang, 2012; Lorsuwannarat, 2017; Mørøe et al., 2021; Park, 2019; Barbakem et al., 2018). Oleh karena itu, APBDes harus memprioritaskan keterlibatan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan sebagai bentuk transparansi kebijakan kepada publik sebagai organ tertinggi kekuasaan Publik. Pembangunan partisipatif dibutuhkan karena masyarakat memiliki aspirasi tersendiri dalam hal penggunaan anggaran untuk kemajuan desa.

Menurut Osborne & Gaesbler dalam Muluk (2010), ada beberapa keunggulan partisipasi masyarakat yaitu, pertama masyarakat memiliki komitmen yang lebih besar kepada para anggotanya; kedua masyarakat lebih baik dalam memahami persoalannya sendiri; ketiga masyarakat menyelesaikan berbagai masalah; keempat masyarakat memberikan kepedulian; kelima masyarakat lebih fleksibel dan kreatif; keenam partisipasi masyarakat lebih murah; ketujuh masyarakat berusaha menegakkan standar perilaku dengan lebih efektif.

Melihat dari fungsi dan manfaat, partisipasi dipandang sebagai hak masyarakat untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan apa dipaparkan oleh Kenneth Lee dan Anne Mills dalam Muluk (2010) bahwa partisipasi berperan untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat akan masuk dalam agenda pemerintahan. Selain itu menurut Kell Antoft dan Jack Novack dalam Muluk (2010), partisipasi bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat dalam menerapkan keputusan yang telah dibuat bersama.

Salah satu kebijakan publik yang menjadi fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014, dapat dijelaskan bahwa peraturan Desa, termasuk APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat berhak memberikan masukan terkait pembahasan

Rancangan Peraturan Desa. Melalui APBDes ini diharapkan pemerintah desa dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki desanya agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Publik

Indonesia. Desa merupakan agen pemerintahan terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan. Desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat, selain itu desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis (Nurcholis, 2011).

Kenyataan di lapangan, desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan tujuan. Hal ini dikarenakan berbagai persoalan antara lain: (a) adanya dominasi oleh elit lokal; (b) lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi; (c) lemahnya organisasi kemasyarakatan lokal; dan (d) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi (Muluk, 2010: 6-7). Masyarakat seharusnya berada pada posisi penting dalam penyusunan pembangunan khususnya APBDes, namun dalam prakteknya masyarakat cenderung diabaikan. Hal ini menyebabkan program-program yang dirancang justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak jarang hanya menguntungkan bagi pihak yang berkepentingan saja.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari warga Publik. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan upaya memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat melalui musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan tujuan peningkatan aspirasi masyarakat berupa keinginan dan kebutuhan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan yang telah dirancang. Selain itu partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting karena pembangunan desa ditujukan kepada masyarakat sehingga harus mampu mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki desa.

Penelitian ini secara khusus membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Tentunya, beberapa penelitian terdahulu belum pernah membahas tentang bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Desa Ayunan dalam penyusunan APBDes. Sehingga, penelitian ini akan membahas lebih jauh tentang partisipasi masyarakat di Desa Ayunan dengan kondisi dan komposisi sosial masyarakat yang berbeda dari desa-desa lainnya. Dana Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada tahun 2020 sebesar 1,1 Miliar.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBDES di DesaAyunan Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Tahun 2020-2023?
- b. Apa sajakah Faktor penghambat dan pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBDES di Desa Ayunan Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020-2023 ?

2. Landasan Teori

Berdasarkan landasan teori, maka dapat digambarkan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDESTahun Anggaran 2020 Di Desa Ayunan Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, dengan menggunakan Teori partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) yang terdiri dari faktor-faktor partisipasi menjadi tiga jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam perencanaan. Kedua, partisipasi dalam penyusunan. Ketiga, partisipasi dalam pengesahan.

Pertama, partisipasi dalam perencanaan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam perencanaan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam penyusunan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam penyusunan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengesahan. Partisipasi dalam pengesahan tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realitas yang cermat terhadap fenomena yang terjadi yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah berdasarkan fakta yang nampak. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari pada sekedar angka atau frekuensi. Sifat penelitian semacam ini mampu memperlihatkan secara langsung hubungan transaksi antara peneliti dengan yang diteliti yang memudahkan pencarian kedalaman makna

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa APBDes yaitu partisipasi melalui pemikiran dengan memberikan ide atau pendapat dalam penyusunan APBDes Desa Ayunan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dan kemudian dipertimbangkan oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran. Faktor pendukung yaitu 1) Tingkat Pendidikan, sumber daya manusia yang mendukung diharapkan dapat memberikan usulan, ide atau pendapat yang lebih substansial tentang kebutuhan apa yang perlu dan urgen 2) jenis Pekerjaan menentukan aspirasi dan partisipasi apa yang dapat diberikan melalui kegiatan desa. Sedangkan faktor penghambat adalah adalah tidak semua usulan yang disampaikan masyarakat melalui forum musyawarah dusun atau pun musyawarah desa diakomodir menjadi program. Keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan antusiasme warga Desa Ayunan sangat mengikuti setiap proses penyusunan APB Desa Ayunan sangat tinggi

PENUTUP

1. Kesimpulan

Partisipasi Masyarakat Desa Ayunan dalam Penyusuna APBDes sangat tinggi dan secara aktif perwakilan masyarakat memberikan masukan dan saran dalam setiap rapat atau musyawarah desa.

Factor penghambat dan pendukung dari partisipasi masyarakat desa Ayunan adalah sumber daya manusia yang masih rendah dan pekerjaan masyarakat desa Ayunan yang mayoritas adalah petani.

2. Saran

Pemerintah desa semestinya meningkatkan kembali sumber-sumber pendapatan desa Ayunan sehingga mampu merealisasikan program-program pemerintah desa secara lebih luas.

Mendorong masyarakat desa terutama generasi mudanya untuk bersekolah lebih tinggi hingga nantinya kualitas sumber daya di desa Ayunan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. Salemba Empat : Jakarta
- Abdul Syani. 2007. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Abdulsyani. (1987). Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remadja Karya
- Alam, M., & Baidya, E. U. (2019). Empowering the urban poor through participatory planning process: a case from Jhenaidah, Bangladesh. *Journal of Contemporary Urban Affairs*, 3(2), 47–54. <https://doi.org/10.25034/ijcua.2018.4700>
- Amalia, P. I. A., & Sugiartono, E. (2021). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(1), 45–53. <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i1.2643>
- Asasandi, I. G. N. A., & Afzal, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Belanting Dalam Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pada Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa. *Ganec Swara*, 13(1), 115. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.70>
- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene, 2011, Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta
- Aswari, Z., Turi, L. O., & Murniati, M. (2019). Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2017 Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 4(2), 54. <https://doi.org/10.36709/jopspe.v4i2.13767>
- Barbakem, D. I., Tinangon, J. J., & Sabijono, H. (2018). Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.32400/gc.13.01.18819.2018>
- Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Apbdes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176>
- Dadang Juliantara. (2002). *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Desriadi. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 63–85. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1240>
- Erica Denny. 2018. Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Lverage, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas kinerja keuangan PT Kino Indonesia Tbk
- Erwandi, A. (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Untuk Melestarikan Budaya Masyarakat di Desa Solam Raya Kecamatan

Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27. <https://doi.org/10.51826/.v5i2.114>

Etika, C. (2018). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa Dan Penguat Otonomi Desa. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 2, 70–75. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i1.368>

Hadjar, Ibnu, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Hetifa Sj, Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia

Hidayat, M., & Karjuni, D. (2019). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>

Hurriyaturrohman, Indupurnahayu, & Septianingsih, P. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan). *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1), 12. <https://doi.org/10.32832/neraca.v16i1.4589>

Husein Umar (2007). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta Pustaka Utama

Imam Suprayogo, 2001, Tobroni, *Metode Penelitian Sosial* cet. 1, Bandung : Remaja Rosdakarya, hal 47

Johnson et al., 2022; Lehtonen, 2021; Liao & Zhang, 2012; Lorsuwannarat, 2017; Mærøe et al., 2021; Park, 2019; Barbakem et al., 2018

Johnson, B., Jones, P. A., & Reitano, V. (2022). Stakeholder networks and inclusive public participation mechanisms in the public budgeting process. *Urban Governance*, September 2021. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2021.12.007>

Koentjaraningrat (1981: 146-147) pengantar Ilmu Antropologi Jakarta: rineka cipta

Lehtonen, P. (2021). Policy on the move: the enabling settings of participation in participatory budgeting. *Policy Studies*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1080/01442872.2021.1895981>

Liao, Y., & Zhang, Y. (2012). Citizen participation in local budgeting: Mechanisms, political support, and city manager's moderating role. *International Review of Public Administration*, 17(2), 19–38. <https://doi.org/10.1080/12294659.2012.10805226>

Lorsuwannarat, T. (2017). Public Participation in Budgeting: The New Path of Budget Reform in Thailand. *International Journal of Public Administration*, 40(5), 385–400. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1126730>

Mærøe, A. R., Norta, A., Tsap, V., & Pappel, I. (2021). Increasing citizen participation in e-participatory budgeting processes. *Journal of Information Technology and Politics*, 18(2), 125–147. <https://doi.org/10.1080/19331681.2020.1821421>

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Masri Singarimbun, 2009, *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Mayo (1998: Mayo.M (1994)"community work". Dalam Hanvey and Philpot(end) *Practising Sosial Work*, London Routhledge.

Mewvi I. Walukow, Lintje Kalangi, S. P. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi* Vol.12 No.2, Hlm, 21(1), 636-275. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17616.2017>

Moeljono, M. (2019). Musrenbang Acara Ceremonial Atau Penyerapan Aspirasi (Studi Kasus Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa di Desa Tegal Arum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah). *Solusi*, 17(2), 17–38. <https://doi.org/10.26623/.v17i2.1453>

Nurcholis, Hanif, 2011. "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Penerbit Erlangga.

Osborne & Gaesbler dalam Muluk (2010) Muluk, Khairul. 2008. Knowledge Management, Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing

Pamungkas, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Lokus Pengendalian dan Pendapatan terhadap Perilaku Keuangan. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 1(1), 157–164. <https://doi.org/10.24912/jmk.v1i1.2798>

Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>

Park, J. H. (2019). Does Citizen Participation Matter to Performance-Based Budgeting? *Public Performance and Management Review*, 42(2), 280–304. <https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1437050>

Prasetya, T.I. 2008. Partisipasi dan Legal Draft. Malang: Wordpress.

Rachmawati et al., 2022 Payung, Rachmawati, et al. Factors in Acute Transfusion Reaction. *Indones.J.Clin. Pathol.Med.Lab*.2016 July; 22(3): 274–278

Rachmawati, D., Nurjaman, A., & Sihidi, I. T. (2022). Implementation of E-Voting in the Village Head Election (Pilkades) Selotinatah , Ngariboyo District , Magetan Regency. *Journal of Public Policy*, 8(1), 24-28. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i1.3812>

Rahma, I. (2019). Partisipasi publik dan keterbukaan informasi dalam penyusunan kebijakan.

Jurnal Hukum Sumber Keadilan, 14, 80–95. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1101>
Riduwan (2009:21 dasar-dasar statistika, Bandung: Alfabeta
Salusu J, 1998, Pengambilan Keputusan Stratejik, Jakarta: Grasindo

Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 251–270. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.197>

Sihidi, I. T., Sugiharto, M. A., & Nurkhanifah, L. (2021). The Effectiveness of Smart City Program Through Batu Among Tani Teknologi (BATT) in Batu City, Indonesia. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.31314/pjia.10.1.1-17.2021>

Soeratno & Arsyad. (2005). Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Suarjaya, I. K. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Sangeh Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 18(1), 10–27. <https://doi.org/10.54836/widyanata.v18i1.602>

Sudarto, 2015, Hukum Pidana I Cetakan ke II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Sugiyono (2009) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.

Suharsimi Arikunto (2000:134), Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Rineka Cipta

Sukriono, D. (2021). Preparation and Designation Middle-Term Village Development. 6, 92–100.